

BERPEMILU, TIDAK KONSISTEN BERDEMOKRASI: ANOMALI ANTIKORUPSI DI NEGARA PEMILU SERENTAK SATU HARI TERBESAR DI DUNIA

Titi Anggraini

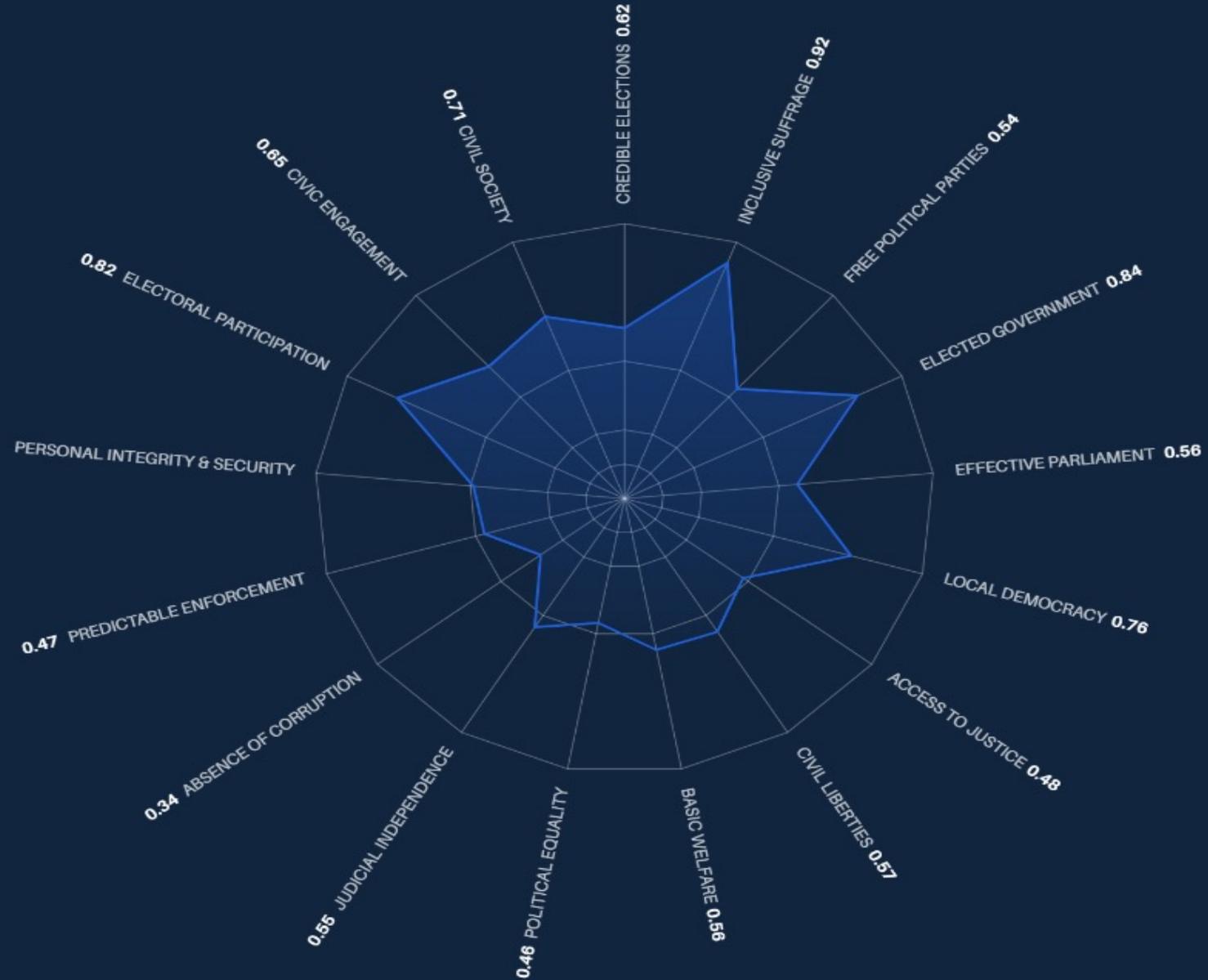
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

<https://perludem.org/>

IG: @tanggraini, Twitter: @titianggraini
YouTube: Titi Anggraini, TikTok: @titianggraini79

Kinerja Demokrasi Indonesia Makin Kritis

- **The Economist Intelligence Unit (EIU): Indonesia dalam rezim demokrasi cacat (*flawed democracy*).** Peringkat 54 dunia (menurun dua peringkat). Skor untuk proses pemilu dan pluralisme adalah 7.92, tertinggi dibanding semua skor pada kategori lain. Kategori **kultur politik menyumbang skor terendah dengan angka 4.38.**
- Global State of Democracy (GSoD) International IDEA menganalisis aspek **Representation, Rights, Rule of Law, and Participation:** Indonesia negara demokrasi dengan **kinerja menengah (*mid-performing democracy*).** Menunjukkan peningkatan signifikan dalam bidang Kesejahteraan Dasar (Basic Welfare) selama 10 terakhir. **Namun, terjadi penurunan signifikan pada lima tahun terakhir dalam bidang Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*), Kebebasan Berekspresi (*Freedom of Expression*), dan Kesetaraan Kelompok Sosial (*Social Group Equality*).**
- **V-Dem: Indonesia negara dengan rezim demokrasi elektoral (*electoral democracy*).** Peringkat 79 dunia. Masuk **sembilan negara yang sejak tahun 2012 mengalami penurunan demokratisasi secara signifikan,** yakni Afganistan, Bangladesh, Kamboja, Hong Kong, India, Indonersia, Myanmar, Filipina, dan Thailand.



Electoral Integrity Global Report 2023

- Indonesia mendapat skor 64 yang menempatkannya **dibawah Taiwan, Jepang, Mongolia, Timor Leste, dan Bhutan.**
- Seperti halnya indeks demokrasi, integritas pemilu tertinggi juga ada di **Eropa Barat, dengan negara-negara Nordik Denmark (87) dan Swedia (81), bersama Austria (83) dan Slovenia (80).**
- Pemilu dengan tingkat integritas pemilu terendah mencakup pemilu di negara-negara Afrika Sub-Sahara, dengan Republik Kongo (27), Angola (31), dan Guinea Ekuatorial (16).
- Indikator integritas lingkungan kampanye merupakan tahapan dengan skor terendah dalam siklus pemilu, **sedangkan dana kampanye dan media kampanye menempati peringkat terbawah.**
- Sebaliknya, prosedur pemilu, penghitungan suara, dan hasil secara keseluruhan mempunyai nilai yang tinggi.

JUMLAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMILU

PEMILIHAN 2018



TREN PUTUSAN:

- Netralitas kepala Desa & ASN, Pasal 188 Jo. Pasal 71 (**33 Putusan**)
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah & Pendidikan, Pasal 187 ayat (3) (**7 Putusan**)
- Politik Uang, Pasal 187A (**6 Putusan**)
- Kampanye di luar jadwal, Pasal 187 ayat (1) (**4 Putusan**)

PEMILU 2019



TREN PUTUSAN:

- Politik Uang, Pasal 523 & Pasal 521 (**83 Putusan**)
- Mencoblos lebih dari sekali, Pasal 516 & 533 (**65 Putusan**)
- Menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara, Pasal 532 (**43 Putusan**)
- Netralitas kepala Desa, Pasal 490 (**31 Putusan**)

PEMILIHAN 2020



TREN PUTUSAN:

- Netralitas kepala Desa & ASN, Pasal 188 Jo. Pasal 71 (**73 Putusan**)
- Politik Uang, Pasal 187A (**23 Putusan**)
- Memberi suara lebih dari sekali, Pasal 178B (**13 Putusan**)
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah & Pendidikan, Pasal 187 ayat (3) (**10 Putusan**)

Anomali Indonesia: Terbiasa Berpemilu, Tapi Tidak Antikorupsi

- Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama (2024), yang dimulai dengan tetap memaksakan pilkada di tengah masa pandemi berat (2020), **secara sengaja dan sistemik didesain agar pemilu dan pilkada sulit terselenggara sesuai prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil**. Masa Kampanye sangat pendek (75 hari), pencalonan mepet, penyelenggara pemilu sangat sibuk, pemilih sulit fokus pada politik gagasan. Akibatnya: publik tidak fokus dan mudah terkecoh oleh kontroversi dan spekulasi, konsolidasi internal partai kedodoran, penyelenggara pemilu permisif pada Integritas pemilu. Kontrol dan pengawasan tidak optimal, kelompok prostatus quo terus mengonsolidasi diri.
- Pengaturan dana kampanye dan politik uang memang dibuat untuk tidak mampu mewujudkan akuntabilitas dan penegakan hukum yang efektif.
- Absennya demokrasi internal partai memperburuk **praktik politik transaksional stadium akut** (berdampak mahar politik, jual beli nomor urut, jual beli suara, kooptasi partisan atas lembaga-lembaga independen negara).

Apa selanjutnya?

- Presiden dan DPR hasil Pemilu 2024 harus serius membenahi UU Kepemiluan dan Partai Politik.
- Demokratisasi internal partai: reformasi pendanaan melalui pembiayaan dana negara yang lebih signifikan untuk parpol, konsistensi menerapkan kaderisasi (mekanisme pemilihan internal untuk rekrutmen politik, syarat minimal sebagai kader untuk pengisian jabatan politik).
- Penegakan hukum yang konsisten untuk praktik politik transaksional (mahar politik, jual beli nomor urut, jual beli suara, suap politik).
- Pengesahan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk memotong mata rantai jual beli suara di pemilu dan pilkada.